

ATLAS SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR LAMPUNG : SUATU HASIL DAN PROSES

BUDY WIRYAWAN, BILL MARSDEN
Proyek Pesisir/CRMP Lampung

IAN M DUTTON
Proyek Pesisir/CRMP Indonesia

ABSTRAK

Sebagai bagian dari kerjasama USAID-BAPPENAS dalam pengelolaan wilayah pesisir, pada tahun pertama, BAPPEDA telah memberikan mandat kepada CRMP/Proyek Pesisir untuk membuat profil wilayah pesisir Lampung, yang menyajikan gambar status masa kini tentang sumberdaya alam dan manusia di seluruh wilayah pesisir Lampung.

Data telah dihimpun dari semua lembaga instansi pemerintah terkait dan analisis awal telah dilaksanakan, namun karena terjadi ketidak konsistenan dan keterbatasan informasi, maka diperlukan upaya ekstra untuk mengklarifikasi situasi di lapangan.

Lebih dari 250 orang telah terlibat secara aktif dalam pengumpulan informasi: staf Dinas teknis tingkat II dan tingkat I, Universitas Lampung, Institut Pertanian Bogor dan Lembaga Swadaya Masyarakat lokal. Wawancara dilaksanakan terhadap sedikitnya 4 orang yang mewakili desanya dari 184 desa pantai yang ada di Lampung. Antara September 1998 dan Mei 1999 melalui proses kontekstualisasi progresif serta penajaman fokus pengumpulan informasi, akhirnya kejelasan dan gambar aktual dari situasi dan potensi pembangunan di Lampung telah dikompilasi.

Informasi yang tersusun dari semua Laporan Teknis dan suatu seri *draft* Atlas kemudian dipresentasikan kembali kepada penyedia informasi selama tiga bulan waktu verifikasi. Pada akhir Mei 1999 informasi yang telah disetujui keabsahannya oleh semua pihak siap untuk dipublikasikan. Pada bulan Juli 1999, Atlas ini dipublikasikan dan didistribusikan kepada lebih dari 500 organisasi di Lampung. Informasi yang terdapat dalam Atlas ini diharapkan akan digunakan selama proses penyatuan visi atau dalam penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Lampung, yang telah dimandatkan oleh Gubernur Lampung menjadi fokus utama kegiatan Proyek Pesisir tahun kedua.

Kata-kata kunci: wilayah pesisir, profil, atlas

ABSTRACT

As part of the USAID- Bappenas Coastal Resources Management Project's (CRMP) first year in Lampung, the Provincial Planning Board in Lampung requested that a profile of the coastal areas be prepared, to provide an up-to-date picture of the status of the resources, natural and human uses, throughout the coastal region of Lampung.

Data was collected from all the relevant Government services and a preliminary analysis conducted. The inconsistencies and shortfalls in information collected allowed CRMP resources to be channelled to priority subjects for primary data collection (field surveys) in all coastal areas of Lampung Province.

Over 250 people were involved in actively gathering information; Dinas staff at District and Provincial level and volunteers from Unila, IPB and local NGO's were invited to undertake each step of the process. Interviews were conducted with at least four people from almost every one of 184 villages on the coastline in Lampung (over 600 interviews). Between September 1998 and May 1999 and through a process of progressive contextualisation and narrowing the focus of information gathering, a clear and up to date picture of the situation and potential for development in Lampung was compiled.

The information compiled in technical reports and a series of drafts of the Atlas of the Coastal Resources of Lampung, were then presented back to the providers of the information during a three month period of verification. By the end of May 1999, the information had been agreed as true by Government services at Provincial and District level and by members of Lampung's NGO and commercial sectors. In July 1999 the Atlas of the Coastal Resources of Lampung was published and distributed to over 500 organisations in Lampung. The information contained in the Atlas is expected to be used during the visioning process for strategic planning (Renstra) of the coastal areas of Lampung, that has been requested by the Governor of Lampung to be the focus of the CRMP's second year of activity.

Keywords: coastal areas, profile, atlas

PENDAHULUAN

Tujuan Proyek Pesisir/CRMP (*Coastal Resources Management Project*) adalah untuk mencapai kemajuan yang terukur menuju desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir (USAID, 1996 dalam CRMP, 1998). Secara informal disebut “mengajak semua pihak untuk bersama memelihara pesisir untuk kehidupan yang lebih baik”.

Keluaran yang diharapkan dari Proyek Pesisir pada tahun pertama, adalah :

1. Meningkatkan dan memperkuat sumberdaya manusia lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir
2. Pembuatan “Profil” yang lengkap, dan pengumpulan informasi yang benar dan mutakhir mengenai komponen pembangunan Lampung. Dari berbagai informasi yang memaparkan pesisir Lampung dan masyarakatnya, akhirnya disusun “ Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung”.

Pembangunan SDM dimulai dengan pelatihan untuk para staf Pemerintah Daerah pada tingkat menengah dan atas, yang dikoordinir oleh staf dari Proyek Pesisir dan difasilitasi oleh staf dari PKSPL -IPB.

Dengan kelompok kunci staf pemerintah lokal yang memahami tujuan Proyek Pesisir, maka tim Proyek Pesisir bersama mereka dan mitra lain memulai kegiatan pembuatan profil pesisir Lampung.

Proyek Pesisir adalah proyek pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Oleh karenanya, pembuatan profil wilayah pesisir propinsi yang besar ini, merupakan tantangan baru. Jumlah penduduk di desa-desa pesisir Lampung diperkirakan 400.000 (BAPPEDA, 1998), ditambah dengan jumlah penduduk kota Bandar Lampung, dan jumlah penduduk desa pantai, jumlahnya menjadi 1,2 juta jiwa.

TAHAPAN PROSES PENGUMPULAN INFORMASI

Pesisir lampung

Propinsi Lampung (35.376 km²) merupakan wilayah paling selatan di pulau Sumatera dan merupakan pintu gerbang antara Sumatera dan Jawa. Propinsi ini dicirikan dengan pegunungan dan hutan di wilayah barat dan dataran rendah (20.780 km²) di wilayah tengah dan timur dengan

sungai-sungainya yang panjang dan bermuara sebagian besar di Laut Jawa. Di pesisir bagian selatan Lampung terdapat dua teluk yang terbesar di Sumatera, yaitu: Teluk Lampung dan Teluk Semangka.

Dampak dari kegiatan manusia di Lampung menyebabkan perubahan yang besar bagi wilayah pesisirnya. Jumlah penduduk telah meningkat sekitar 300 % selama kurun waktu 25 tahun, sehingga menjadi 6,95 juta jiwa (BPS, 1998). Puluhan ribu hektar hutan telah dikonversi menjadi perkebunan dan lahan pertanian. Alih fungsi lahan dari rawa menjadi sawah beririgasi (Proyek Rawa Sragi-Jitu-Pitu) telah menyebabkan hilangnya 51.500 rawa (CRMP 1998 (3), Binnie dan Partner, 1994).

Sekitar 20.000 ha mangrove yang diestimasi pada tahun 1980 menjadi sekitar 2000 ha (CRMP, 1998 (3)), sebagian hilang sewaktu proses pengeringan rawa, dan ditambah lagi dengan pengembangan tambak udang di pantai timur Lampung yang tidak terkontrol (CRMP, 1998 (7)).

Perencanaan yang sentralistik dan kebutuhan akan sumberdaya alam primer telah menyebabkan degradasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati. Biasanya sektor swasta dan individu yang telah mengkonversi lahan di Pesisir Lampung telah mengatasnamakan “pembangunan”. Saat ini, keaslian alam Lampung hanya dapat dilihat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Way Kambas, yang juga rentan terhadap penjarahan lahan.

Partisipasi

Dalam pembuatan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung telah disepakati bahwa “partisipasi” haruslah dikonsentrasikan pada pemenuhan dua tujuan, yaitu :

1. Setiap desa yang mempunyai garis pantai haruslah dikunjungi oleh tim CRMP untuk mendapatkan data primer dan verifikasi data sekunder.
2. Partisipasi dari kelompok-kelompok yang dapat menggandakan efek dari Tim CRMP, seperti : Dinas-dinas di Propinsi dan Kabupaten/Desa, LSM lokal, Universitas (staf dan mahasiswa).

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam pembuatan gambar status dan potensi pesisir Lampung, maka CRMP telah merekrut

konsultan lokal dari Universitas Lampung (UNILA), termasuk dua orang ‘advisor’, sedang konsultan bidang yang tidak tersedia di Lampung diambil dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)-IPB, UI dan ITB. Tabel 1 memberikan gambaran yang diperlukan dalam pembuatan Profil Pesisir Lampung.

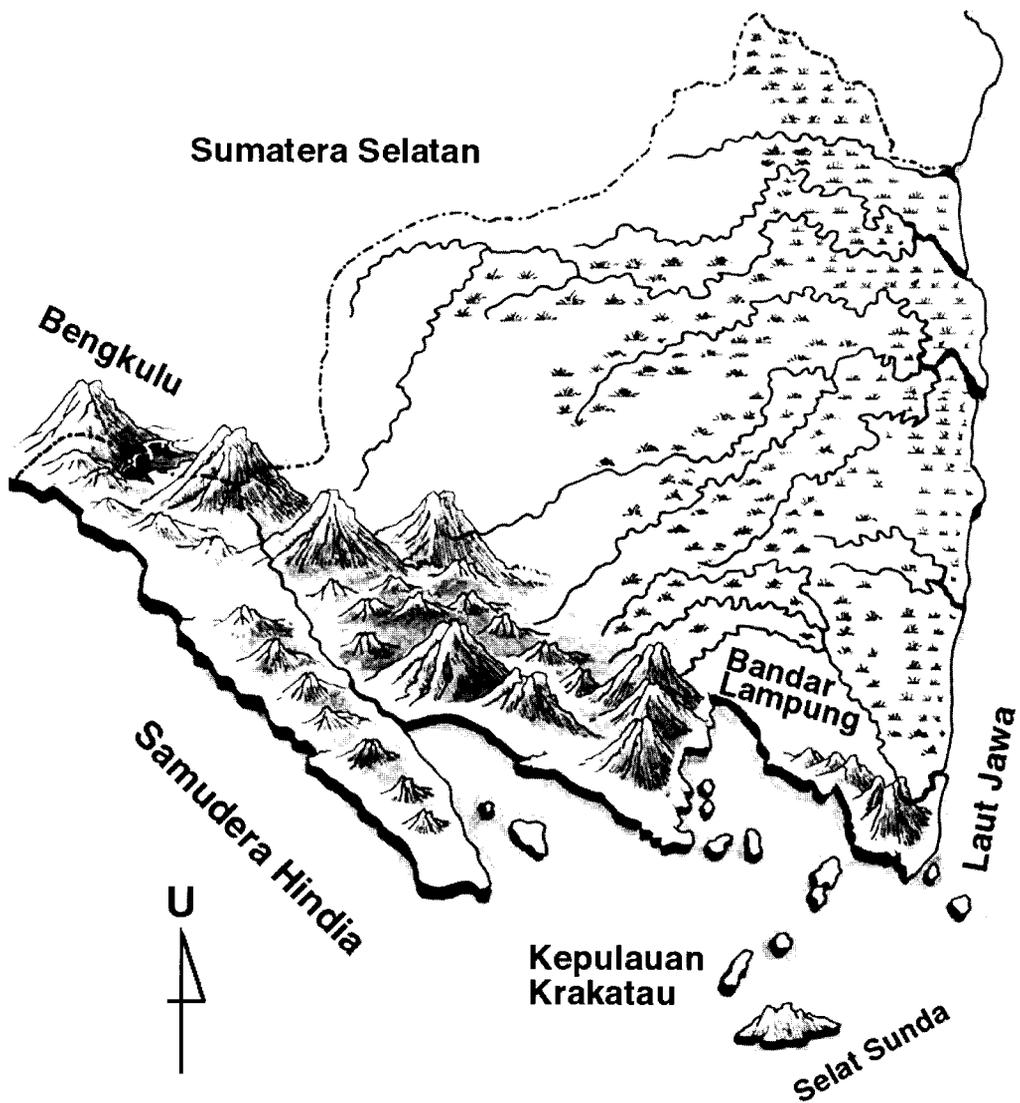
Peran Pemerintah Daerah (PEMDA)

Pengalaman dan pengetahuan tentang propinsi Lampung oleh instansi pemerintah di hirarki pemerintahan (dari propinsi sampai desa) kurang seimbang. Informasi biasanya tersebar berdasarkan hirarkinya dan sulit untuk diakses. Informasi yang telah diproses umumnya kurang

akurat dan biasanya kadaluwarsa. Pengumpulan data yang akurat dari instansi pemerintah biasanya memakan waktu banyak dan senantiasa diperlukan pengecekan ulang, karena umumnya tidak sinkron antara dua sumber informasi (CRMP, 1998 (7)). (Tabel 2.)

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pada waktu awal LSM berperan sebagai *volunteer*, tetapi selanjutnya mereka adalah partner yang dikukuhkan dengan Persetujuan Kerjasama (MoU). Anggota LSM Lampung biasanya adalah pemuda lulusan universitas lokal yang idealis, dengan tingkat motivasi yang tinggi terhadap perubahan yang positif di Indonesia dan



Gambar 1. Topografi Lampung (sumber: Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung, 1999)

Tabel 1. Sumberdaya manusia yang telah digunakan dalam pembuatan Profil Pesisir Lampung

Cakupan Kontrak Kerja	Tim Teknis	Relawan/Asisten	Waktu Kerja (bulan)
Penggunaan Lahan	Dr. AliKabul Mahi	2	3
Budidaya Perikanan	Bill Marsden	20	23
Sosio-budaya	Dr. Yunita Winarto/ Elshinta Suyoso	10	15
DAS dan lahan basah	Max Zieren	0	1.5
Oseanografi	Dr. R. Kaswadji dan Dr. John Pariwono	0	1
Pariwisata	Wahyu Sasongko Mark Black	3	4
Perikanan tangkap	Dr. Gondo Puspito	7	6
Ekosistem pesisir	Dr. R. Kaswadji	11	8.5
Polusi	Ida Farida	0	2
SIG	Yus Rustanti	3	3
Drafter	Gingin Gunawan	0	0.5
Pustaka	Susana dan Irma	2	3
Basis data	Kurnia Muludi	0	0.6
Pengolahan data	Handoko Setia Lesmana	3	96
Tim PKSPL-IPB	Dr. Dietriech Bengen	9	36
Administrasi/Keuangan	Susilawati Revita Meuthia	8	96
Kordinator tim Lampung	Dr. Budy Wiryawan	8	96
Pemda Lampung	Drs Oemarsono	110	-
TOTAL		>70	+/- 400

merupakan mitra yang dinamis untuk program lapangan. Peran yang diinginkan adalah kontak langsung dengan masyarakat di wilayah pesisir. Para anggota LSM memiliki perilaku khas, suka mengkritik kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam. Mereka biasanya 'vokal' dalam menyuarakan perubahan-perubahan. Beberapa dari mereka mempunyai pengalaman sebagai motivator masyarakat.

Pada saat penancangan CRMP di Lampung, belum ada LSM yang mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan isu pesisir dan belum ada pengalaman dengan masyarakat nelayan (sebelumnya mereka bekerja untuk isu lingkungan,

kehutanan dan pengembangan perekonomian/ simpan-pinjam). Dengan kekurangan inisiatif dari LSM untuk pengelolaan pesisir, maka CRMP telah meluangkan banyak waktu dan sumberdaya. Untuk menghindari kecurigaan terhadap inisiatif kerjasama dan kemandirian institusi dalam berpartisipasi, maka CRMP telah mengembangkan beberapa kiat partisipasi dengan LSM dalam kegiatan CRMP di Lampung, yaitu :

- ♦ Melibatkan diri dari sejak awal (sosialisasi program/proyek)
- ♦ Menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan/ dekonstruksi konsep awal

- ♦ Berperan proaktif dalam menjelaskan alasan-alasan perbedaan dalam pendekatan antara Pemda dan LSM
- ♦ Memelihara toleransi yang tinggi kepada perbedaan opini dan menerima kedua belah pihak atas opini yang salah
- ♦ Mengalokasikan waktu ekstra untuk menjembatani ego masing-masing pihak
- ♦ Menghargai kemungkinan perbedaan gaya kerja dan menerima nilai masing-masing.

Peran Sektor Swasta

Hubungan yang khusus antara CRMP dan berbagai macam industri di Lampung sangatlah diperlukan. Kebanyakan industri di Lampung tidak mempunyai tradisi partisipasi dalam desain dan manajemen usaha mereka. Kecurigaan terhadap motif-motif untuk program pengelolaan pesisir pernah juga ada, tetapi melalui pendekatan informal/personal, dukungan dari sektor industri di Lampung dapat diperoleh.

Peran Media

Pers lokal dan nasional merupakan tim pembuatan profil Lampung yang belum dilibatkan secara optimal. Sejumlah jurnalis profesional telah menyediakan hampir seluruh berita/informasi yang kontroversial tentang profil pesisir Lampung. CRMP telah mendapatkan masukan yang berharga tentang beberapa isu pesisir Lampung dari artikel-artikel di media. Belajar dari kelemahan CRMP untuk mengajak aktif kalangan media, maka kedua belah pihak yaitu CRMP dan PWI Lampung, telah menjalin kerjasama formal dan secara informal melalui beberapa wartawan yang ingin melibatkan diri dalam inisiatif pengelolaan wilayah pesisir Lampung.

Kontribusi CRMP untuk Propinsi Lampung antara lain dengan mengisi acara untuk RRI/TVRI Lampung, misalnya dalam berita daerah ataupun rubrik pembangunan. Sebaliknya diseminasi tentang sosialisasi program dan isu-isu wilayah pesisir Lampung telah dibantu oleh kedua media elektronik tersebut.

Pelatihan-pelatihan

Selain pelatihan-pelatihan resmi kepada staf institusi yang terkait dengan pengelolaan pada kegiatan awal proyek, maka setiap konsultan

diberi tugas untuk memberikan kesempatan kepada *volunteer* lokal untuk 'belajar sambil bekerja'. Pada kasus-kasus tertentu *volunteer* lokal juga memberikan pengetahuan lokal untuk memfasilitasi konsultan dari luar Lampung.

Tingkatan pemahaman teknis yang diperlukan untuk setiap survei dan ketersediaan *volunteer* yang berkualitas ditentukan pula oleh jumlah pelatihan untuk tim survei. Pelatihan tentang profil budidaya perikanan, misalnya, telah melibatkan Balai Budidaya Laut di Hanura, Lampung Selatan sebagai fasilitator.

Pengumpulan Data

Pada awalnya data sekunder didapatkan dari Instansi Pemerintah yang terkait. Setiap tim survei telah memanfaatkan informasi yang relevan. Staf permanen CRMP aktif untuk mendapatkan data di instansi terkait, juga merupakan kesempatan untuk belajar tentang *stakeholder* di Lampung.

Hanya mengandalkan data dari statistik Lampung Dalam Angka (BPS) dirasakan tidak cukup akurat, karena kurang "up to date" (data 18 bulan yang lalu); sedangkan mengumpulkan data dari instansi pemerintah sangatlah memakan waktu, dikarenakan dua alasan, yaitu : (1) informasi biasanya tersebar di antara seksi-seksi, mungkin hanya kepala bagian saja yang mengetahui siapa yang memegang informasi dan kebanyakan mereka tidak punya keyakinan untuk memberikan informasi kepada lembaga baru, (2) informasi kunci biasanya strategis, ekonomis atau mempunyai nilai politis, dan biasanya orang-orang yang berkepentingan di dalam dan di luar instansi pemerintah jarang membagi informasi untuk meminimalkan resiko hubungan yang mereka jalin. Sayangnya, informasi yang berharga biasanya lebih susah untuk diakses.

Informasi yang disediakan oleh instansi pemerintah haruslah dikonfirmasi silang dengan informasi yang berhubungan; sehingga perlu adanya pembobotan informasi dari lapangan yang menyebabkan ongkos informasi menjadi mahal. Metode kajian dalam pembuatan profil pesisir Lampung tercantum dalam Tabel 3. Data kemudian diolah dan dipublikasikan dalam laporan teknis dan diringkas dalam teks Atlas setelah melalui proses pengeditan.

Semua informasi dari hasil survei kemudian dipresentasikan dan didiskusikan dengan *stake-*

Tabel 2. Sumber data sekunder yang digunakan dalam pembuatan Profil Pesisir Lampung.

Sumber Informasi	Jenis Informasi (Hasil pertemuan tim CRMP September 1998)
BPN (Propinsi)	Peta penggunaan lahan, hutan, perikanan, pertanian 1977, 87,97 Statistik pertanahan Proses kepemilikan lahan? Isu?
BAPPEDA (Propinsi)	Peta tata-ruang, 1977,87,97 Propinsi (RUTRW) Peraturan Daerah
Dinas Perikanan (Propinsi dan Kabupaten)	Statistik perikanan, penggunaan lahan, produksi 1977,87, 90, 92,93,94, 95,96,97 <i>Stakeholders</i> situasi sosek Konflik penggunaan perairan Prosedur perijinan Isu?
Dinas Kehutanan / Kanwil Kehutanan	Hutan Mangrove Rencana <i>Silvofishery</i> Program reboisasi Perubahan penggunaan lahan, 1977,87,97 Isu?
Dinas P.U pengairan Kanwil PU	Penggunaan Lahan Jaringan jalan Pelabuhan dan bangunan pantai Erosi dan reklamasi
Kanwil Perhubungan	Konflik Penggunaan perairan (laut) Pengerukan? Atau pekerjaan PU lain
Bapedalda	Polusi Polusi industri dan Prokasih Isu <i>hot spots</i> ?
GAPPINDO/ APPU	Perusahaan Produksi, 1977,87, 90,91,92,93,94,95,96,97 Pemasaran : domestik dan ekspor Kesehatan stok Isu?
KUD mina	Isu?
A.L. /Kamla/ Perhubungan	Pelabuhan dan fasilitasnya Isu? Konflik penggunaan perairan
Referensi ulang (<i>cross referenced</i>) dengan Unila / IPB	Hasil penelitian PSL Penelitian lain Proyek-proyek Survei Sosek AMDAL Aktivitas Hukum (Fakultas Hukum)
LSM-LSM	Konflik Sosek Penyelesaian Sosek Isu-isu lingkungan?
LBH	Konflik penggunaan lahan

Catatan: Data primer dikumpulkan dari survei lapang (Tabel 1)

holders di propinsi dan kabupaten/kota. Ketidak konsistenan dan ketidak akuratan dikoreksi melalui proses verifikasi. Proses Pembuatan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung diterakan dalam Gambar 2.

EVALUASI HASIL

Untuk pertama kali di Indonesia terbit suatu profil wilayah pesisir dengan melibatkan *stakeholders* dalam tahap aktivitas mulai dari perencanaan, implementasi, verifikasi sampai produksi. Waktu yang diperlukan dalam proses ini, termasuk revisi yang mengakomodasi pemekaran Kabupaten/Kota di propinsi Lampung (tanggal 3 April 1999) telah menyebabkan perpanjangan 3 bulan dari rencana anggaran.

Bentala, Yasadana, Wanacala).

Tim CRMP Lampung terdiri dari 3 orang teknis yang mempunyai latar belakang kelautan/perikanan, dibantu oleh konsultan yang telah menyelesaikan pembuatan profil pesisir Lampung pada program tahun pertama. Kegiatan ini merupakan tahap awal dalam mengimplementasikan sebuah proyek desentralisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Ada 5 faktor yang menyebabkan kesuksesan aktivitas dalam implementasi program tahun pertama, yaitu :

1. Akses yang mudah dan dukungan dari Tim Ahli CRMP di Jakarta, PKSPL-IPB dan CRMP Manado.
2. Dukungan yang kuat dari PEMDA dan

Tabel 3. Metode studi yang digunakan oleh tim kajian

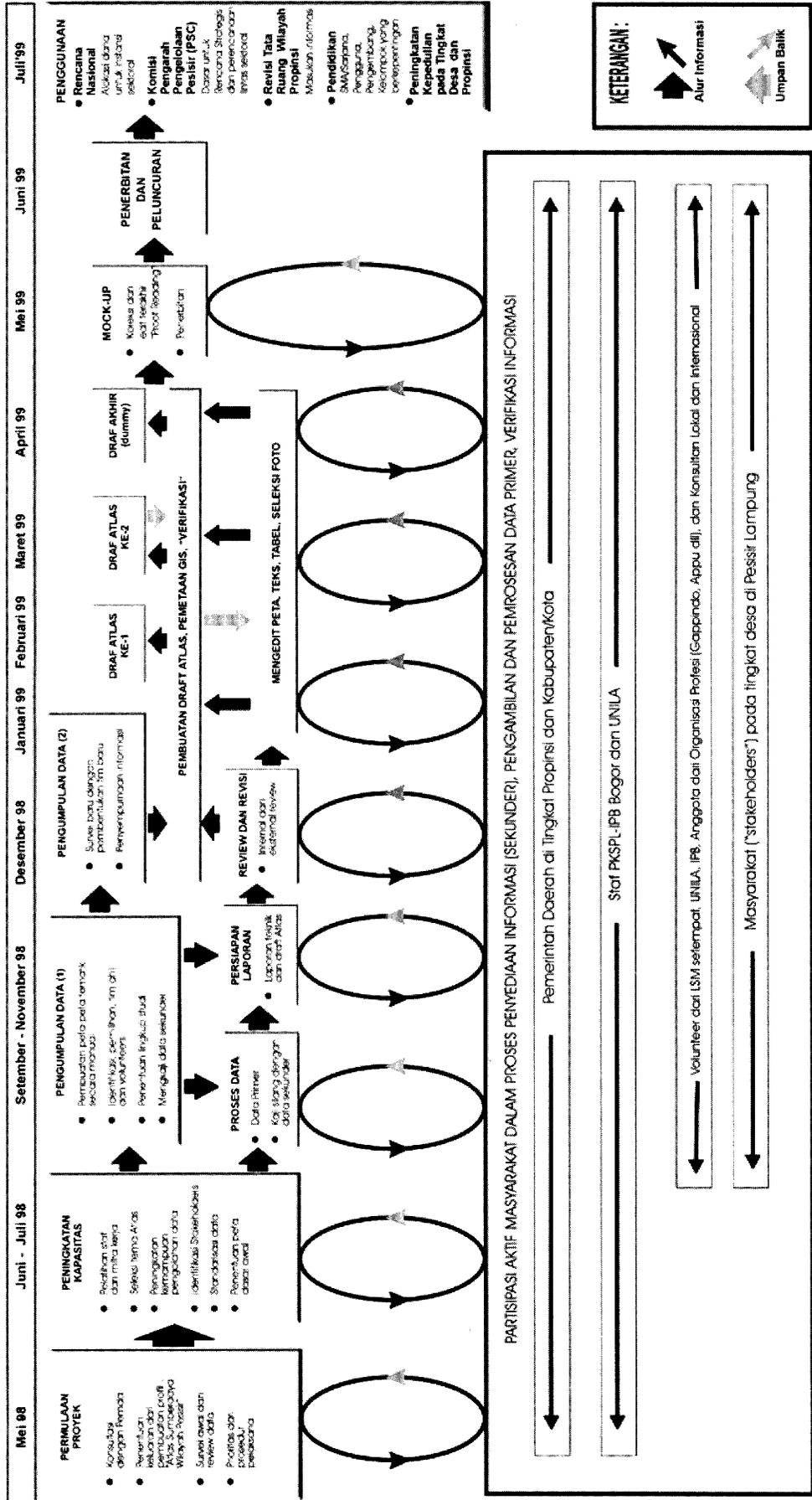
Studi	Teknik
Penggunaan Lahan Budidaya Perikanan	Studi pustaka, cek lapang, pemetaan manual dan digital (dengan <i>volunteers</i>) Studi pustaka, konstruksi basis data, <i>training</i> tim, survei lapang (kuesioner dan observasi), pemrosesan, <i>follow-up surveys</i> (dengan <i>volunteers</i>)
Sosio-budaya	Observasi Anthropologi (dengan <i>volunteers</i>), informal <i>interview</i> , kontekstual progresif
DAS dan lahan basah	Studi pustaka, analisis citra Landsat
Oseanografi	Studi pustaka, cek lapang (dengan <i>volunteers</i>)
Pariwisata	Studi pustaka, cek lapang
Perikanan tangkap	Studi pustaka, cek lapang (dengan <i>volunteers</i>)
Ekosistem pesisir	Studi pustaka, <i>training</i> tim, (observasi lapang / <i>data recording</i>), analisis (dengan <i>volunteers</i>), pemetaan
Polusi	Studi pustaka
SIG	Digitasi peta manual, <i>overlays</i> , artistik penampilan
Drafter	Pemetaan manual
Basis data/pengolahan	<i>Access</i> , Excel <i>data input</i> , tes dan analisis (dengan <i>volunteers</i>)

Umpan balik dari *stakeholders* adalah positif, karena makin banyak instansi yang membutuhkan dan menggunakan informasi yang telah didapat, baik dalam laporan teknis maupun produk peta tematik pertama yang menerbitkan 10 Kabupaten/Kota di Lampung. Produksi Atlas ini juga telah mendorong aktivitas baik di instansi pemerintah maupun non-pemerintah, seperti : kegiatan peningkatan kepedulian lingkungan dan pengelolaan pesisir oleh instansi pemerintah (Bapedalda, TNI-AL, BPPT-CRMP Jakarta, PU Pengairan) dan non-pemerintah (LSM Mitra

kesediaan dari *stakeholders* terkait dalam pembuatan Profil Pesisir lampung, seperti dari LSM dan UNILA.

3. Dukungan teknis dan konsultasi jangka pendek dari Tim dari *University of Rhode Island, Coastal Resources Center*.
4. Kemampuan untuk merekrut tim konsultan jangka pendek baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Kemauan dari staf CRMP untuk melaksanakan kegiatan ekstra, misalnya dengan menjadi *stakeholder*, dari aktivitas organisasi lain, baik

BAGAN ALUR PROSES PEMBUATAN ATLAS SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR LAMPUNG



Gambar 2. Bagan alur proses pembuatan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung (sumber: Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung, 1999)

Tabel 4. Sinergi yang didapat oleh Proyek Pesisir dari pembuatan Profil dan Atlas

Aktivitas	Partisipasi aktif oleh Lembaga	Kerangka waktu dan anggaran
Pelatihan Kepedulian Lingkungan Pesisir untuk LSM	Mitra Bentala, Yasadana, Wanacala dan watala	November 1998
Diskusi Masa depan Teluk Lampung	Bapedalda, Industri, LSM, Pemda Propinsi/ Kabupaten/Kota, instansi sektoral	23 Februari 1998
Aksi Bersih Pantai	AL, Mapala, Pramuka, Watala, Yasadana, Himbio, Mapala, PP, Bapedalda, Pemda LamSel	Hari Bahari September 1998, Krakatau Festival Agustus 1999
Lokakarya Pengelolaan Pulau Kecil	BPPT-CRMP Jakarta, Mitra Bentala, Watala, Yasadana, PP	9 Desember 1998
Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Mitra Bentala	Maret 1999-
Aspek Lingkungan dalam Festival Krakatau 1999	Dinas/kanwil Pariwisata, Unila, Wanacala, Mitra Bentala, AL, Swasta, PP	Agustus 1999
Monitoring Terumbu Karang	Anemon (Unila), <i>Fisheries Diving Club</i> (FDC)-IPB, PP	April 1999
Expedisi Zooxanthellae V (Lampung Barat)	FDC-IPB, Pemda Lampung Barat, AL, SCTV, PKSPL-IPB, PP	1-20 Agustus 1999
Pengelola Air (PTPA)	PU Pengairan, Perikanan, Kehutanan, Bapedalda, Bappeda, PP	Berjalan
Rencana Strategis	Pemda Propinsi, PWI, Unila, Sektoral, LSM	Tahun anggaran 1999/2000
Studi Banding ke Phillipina	CRMP Philipina, Pemda, LSM, PP	
Monitoring kualitas air tanah di Bandar Lampung	Bapedalda-Mitra Bentala	Agustus 1999-Maret 2000

secara profesional maupun sosial dalam masyarakat Lampung.

Setelah tiga bulan aktivitas CRMP Lampung berjalan, tim melaksanakan analisis terhadap *stakeholder* (Tabel 5). Dengan begitu, CRMP Lampung telah mengembangkan strategi-strategi yang mengoptimalkan potensi dari *stakeholders*, dengan meminimalkan dampak dari kelemahan mereka. Perbedaan antara mitra menunjukkan perbedaan pendekatan (lihat petunjuk partisipasi dengan LSM).

Komunikasi dan partisipasi *stakeholders*

Kesulitan terbesar dalam pembuatan profil, antara lain menjaga supaya semua *stakeholders* mendapatkan informasi tentang kemajuan program pesisir. Setiap kunjungan ke instansi pemerintah maupun non-pemerintah, biasanya dimulai dengan menjelaskan visi dan misi Proyek Pesisir, sehingga mendapatkan dukungan, bantuan atau

informasi yang pada umumnya dimiliki oleh individu dalam suatu instansi. Komunikasi di suatu instansi secara horisontal dan vertikal biasanya sangat terbatas.

Modifikasi awal dalam berkomunikasi dilakukan dengan membuat "fact sheet" (brosur singkat) yang dicetak satu halaman dengan mencantumkan maksud dari aktivitas (studi) yang akan dilaksanakan oleh tim CRMP. Pada tahun pertama, didistribusikan lebih dari 1000 selebaran sederhana. Beberapa metode pendekatan dalam mendapatkan informasi dari *stakeholders* tertera dalam Tabel 5.

Walaupun kegiatan ini melibatkan lebih dari 250 orang dari berbagai organisasi pada 8 bulan pertama program Lampung, serta wawancara dengan lebih dari 600 penduduk pesisir, tetapi kritik terhadap CRMP tetap ada dan umumnya berhubungan dengan kurangnya melibatkan "masyarakat" (dan organisasi lain) dalam

Tabel 5. Analisis *stakeholders* kepada mitra CRMP di Lampung

Stakeholder	Kekuatan	Kelemahan
Pemerintah Daerah	Propinsi luas, staf tersebar dari Prop. sampai Desa Pengalaman lama di propinsi Perencanaan dan penganggaran teratur	Ego-sektoral, teritorial Prioritas untuk pesisir rendah SDM terbatas (jumlah dan kualitas) Motivasi rendah untuk kasus tertentu Perencanaan, anggaran dan siklus yang kaku
LSM lokal	Motivasi sosial tinggi Diterima oleh masyarakat Jaringan antar LSM kuat	Belum ada LSM lokal yang berpengalaman di pesisir Kecurigaan terhadap pemerintah SDM dan dana terbatas Ketidak inginan untuk memimpin/mewakili LSM lain
Industri	Sumberdana mencukupi Renponsif kepada perencanaan dan inisiatif	Kecurigaan terhadap pemerintah Beroperasi di batas legal/tidak legal
Masyarakat Pesisir Lampung (asli)	Gaya hidup tradisional Orientasi ekspor (kopi dan damar)	Terbatas di Lampung Barat (dan daratan) Motivasi dan inovasi kurang Minim tradisi laut Naik-turun perekonomian, menyebabkan pengaruh hasil pertanian (cengkeh-kelapa)
Masyarakat Pesisir Lampung (pendatang)	Tingkat inovasi tinggi Industri Hubungan masyarakat (kohesif) Sebaran suku (Sulawesi, Jawa, Bali)	Secara tradisional ekstraktif, berpindah-pindah Kepedulian lingkungan rendah Legalitas aktivitas dipertanyakan

perencanaan dan implementasi. Untuk menanggapi masalah tersebut, Proyek Pesisir Lampung memberikan pelayanan melalui telepon selama 24 jam dan selalu siap untuk datang dalam pertemuan dan kegiatan sosial dan memprioritaskan kunjungan tamu di sela-sela kegiatan rutin. Kegiatan tambahan yang telah dicoba tetapi kurang berlanjut, adalah menjadwalkan kunjungan rutin ke pertemuan-pertemuan. Keterbatasan komunikasi biasanya karena ketidak cocokan waktu (malam) dan beban kerja yang berlebihan.

Dengan selesainya pembuatan profil dan dimulainya proses verifikasi, maka satu grup partisipan telah diidentifikasi dan terus terlibat dalam

isu-isu pesisir. Beberapa orang telah menjadi *stakeholders* kunci pada tingkat Propinsi dan merupakan penghubung utama dalam jaringan kerja CRMP.

Keluaran dari pembuatan profil

Keluaran dari kegiatan pembuatan profil terdiri dari 2 kategori, yaitu : Proses dan Fisik

Proses :

- * Peningkatan kepedulian terhadap isu pesisir dari beberapa kegiatan survei, pertemuan, lokakarya, wawancara dan artikel di media massa (Lampung Post 8 Juli 1999, Koridor 8, 15 Juli 1999, Lampung Ekpress Juli 1999,

Tabel 6. Pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari *stakeholders*

Stakeholder	Pendekatan	Dokumen
Kepala desa dan tokoh masyarakat	Pertemuan formal	Surat jalan dari Bappeda dan Dinas <i>Fact sheet</i> Brosur CRMP
Masyarakat desa	Pertemuan informal Wawancara formal dan informal, observasi lapang	<i>Fact sheet</i>
Industri	Permintaan formal bantuan 'Bloody persistence' (informal)	Surat jalan Bappeda atau Dinas <i>Fact sheet</i> Brosur CRMP
LSM	Pertemuan informal	<i>Fact sheet</i> Brosur CRMP
Pemda	Lewat Kepala Dinas atau Kanwil	Surat jalan dari Bappeda Komunikasi dengan Bupati

Kompas, Suara Pembaruan, dan Tamtama Maret 1999).

- * Peningkatan kepedulian terhadap isu pesisir lewat RRI (siaran langsung pukul 10:00) dan TVRI (Berita dan Program Sorotan TV pukul 17:30)
- * Kaderisasi dari masyarakat dalam pemahaman tentang isu pesisir
- * Peningkatan aktivitas oleh beberapa organisasi di daerah pesisir, baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah
- * Terjadi komunikasi antara berbagai sektor yang sebelumnya belum pernah ada (seperti LSM dan Industri Udang)
- * Peningkatan pengertian tentang status eksploitasi sumberdaya wilayah pesisir
- * Penyajian informasi yang paling mutakhir tentang administrasi dan demografi Lampung.

Fisik:

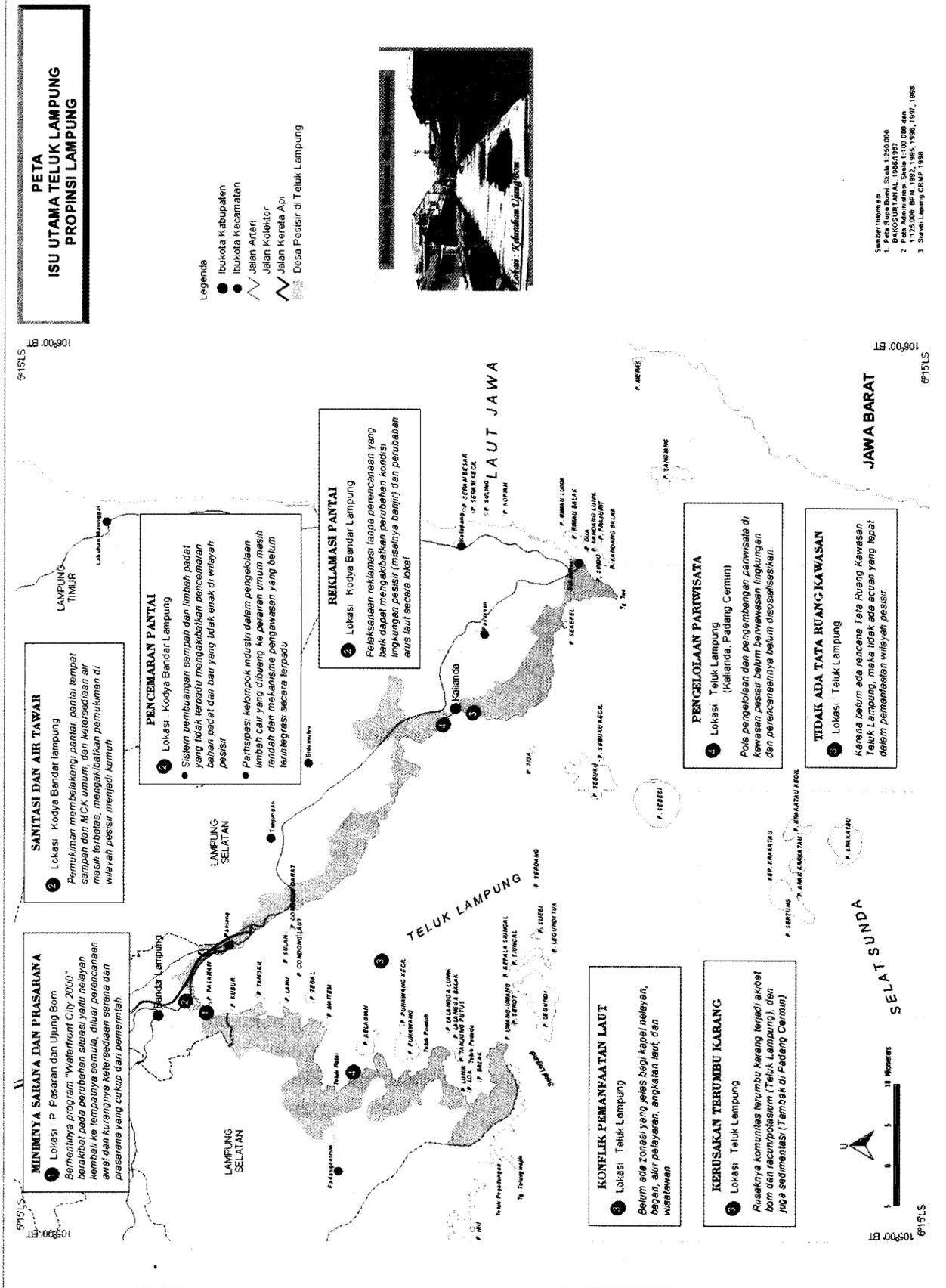
- * Laporan teknis pada setiap konsultasi (studi) dari mulai geologi, sosio-budaya, sampai industri (Tabel 1)
- * Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung, yang terdiri dari 109 halaman termasuk teks, tabel, foto dan peta. Merupakan informasi yang diverifikasi pertama kali untuk suatu propinsi di Indonesia.

Contoh isu wilayah pesisir Lampung

Isu-isu yang ada di wilayah pesisir Lampung sangat bervariasi. Mereka dapat digolongkan kepada alam/lingkungan, potensi konflik antar pengguna/kelemahan dalam tata-ruang (contoh: Gambar 3.), penggunaan sumberdaya yang tidak berkelanjutan, kelemahan dalam implementasi/penegakan hukum dan peraturan pemerintah. Contoh peta sebaran industri yang *dioverlay* dengan DAS dan administrasi setelah pemekaran menjadi 10 Kabupaten/Kota (Gambar 4).

KESIMPULAN

Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung merupakan Atlas khusus yang pertama di Indonesia. Proses pembuatannya melalui pendekatan *learning by doing* dan komunikasi terbuka yang melibatkan segenap grup *stakeholder*, yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Bagaimana hubungan yang terjalin secara baik ini berkembang dan berlanjut untuk aktivitas CRMP di Lampung, masih belum jelas. Perlu adanya komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk mencari satu visi umum yang terpadu tentang pengelolaan wilayah pesisir Lampung. Pembuatan Rencana Strategis (tahun 1999/2000) merupakan latihan menuju pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.



Gambar 3. Isu-isu Pantai Timur Lampung (sumber: atlas Sumberdaya Wilayah pesisir Lampung 1999)

Atlas ini merupakan dokumen yang belum sempurna, karena masih terdapat kesalahan tipografi dan produksi. Namun informasi yang ada akurat dan dapat diterima oleh *stakeholder* pada kurun waktu sekarang. Dokumen tersebut memang tidak secanggih CD-ROM untuk keperluan presentasi, tetapi terdapat keunggulan komparatif, seperti :

1. Dapat dibaca oleh semua pihak tanpa harus menginvestasikan komputer.
2. Ongkos produksi cukup murah (Rp.50 juta untuk 1000 eksemplar), yang memungkinkan bagi PEMDA untuk merevisi dengan anggaran yang tidak terlalu besar.
3. Selain dicetak dalam kertas (buku), informasi secara digital (GIS/Arcview) juga tersedia dan akan diinstall di instansi yang membutuhkan, sehingga memudahkan untuk direvisi secara terpadu.
4. PEMDA dan UNILA telah menyatakan ketertarikannya untuk menginvestasikan anggaran untuk Pusat Informasi Pendidikan pada tahun anggaran 1999/2000.

Pelaksanaan sebuah proyek (CRMP) dengan basis proyek itu sendiri adalah suatu proses dalam siklus pengelolaan pesisir secara terpadu (ICM). Setiap keluaran diharapkan merupakan acuan bagi suatu kemajuan/perubahan, sehingga perlu kiranya untuk mengubah persepsi dari suatu proyek tradisional, dimana (1) implementasi timnya merupakan bagian kecil dari suatu bingkai yang besar, (2) menginginkan waktu yang cepat dan dikerjakan oleh satu orang, sehingga *multiplier* efek ganda untuk mendukung aktivitas dan penyamaan visi tidak tercapai. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan komitmen dari tim yang mengimplentasikan dan lembaga donor.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penerbitan artikel ini maupun Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung, tidak dapat dilakukan tanpa bantuan tim yang besar dari: Proyek Pesisir Lampung, Jakarta, Manado, Balikpapan, CRC-URI, dan staf PKSPL-IPB. Terimakasih juga atas masukan dari berbagai pihak, seperti yang tertera pada halaman 'Terimakasih' di Atlas, dari mulai PEMDA Propinsi sampai Desa, LSM, Universitas dan organisasi profesi, seperti : APPU, Gappindo dan PWI, terutama beberapa anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA. 1997. Studi Penentuan Status Mutu Air Laut Perairan Pesisir Teluk Lampung. Buku Laporan Akhir. CV Madya Rancana.
- BAPPEDA. 1998. Potensi Wilayah Pesisir Pantai dan Kelautan Propinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Binnie and Partners. 1994a/b. Southern Sumatra Water Resources Project. Tulang Bawang Feasibility Studies, Final Report, Volume: 6,15. Technical Reports. PU/Binnie and Partners. Bandar Lampung.
- Black, M. 1998. Report on Marine Resource Use and Potential Tourism in Lampung Bay. Intern Study for CRMP-Lampung (Draft). Bandar Lampung.
- BLH. 1995. Prokasih, Program Kali Bersih Propinsi Lampung Tahun 1995. Bandar Lampung
- BPS. 1997. Lampung dan Kabupaten/Kotamadya Dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Propinsi Lampung.
- BPS. 1998. Laporan Kependudukan Propinsi Lampung. Badan Pusat Statistik. Propinsi Lampung.
- CRMP. 1998. Year Three Workplan , April 1999-March 2000. Proyek Pesisir/AR-99/01-E.
- CRMP. 1998 (1). Laporan Penyelidikan Geologi Daerah Pesisir Pantai Propinsi Lampung. Technical Report CRMP Lampung. Bandar Lampung.
- CRMP. 1998 (2). Profil Perikanan Tangkap Propinsi Lampung. Technical Report CRMP Lampung. Bandar Lampung.
- CRMP. 1998 (3). Significant Coastal Habitats, Wildlife and Water Resources in Lampung. Technical Report CRMP Lampung. Bandar Lampung.
- CRMP. 1998 (4). Profil Habitat Perairan Pantai Propinsi Lampung. Technical Report CRMP Lampung. Bandar Lampung.
- CRMP. 1998 (5). Kesesuaian dan Arah Pengembangan Lahan Pertanian Pesisir Lampung. Technical Report CRMP Lampung. Bandar Lampung.
- CRMP. 1998 (6). Sumber-sumber Pencemaran Wilayah Pesisir Propinsi Lampung. Technical Report CRMP Lampung. Bandar Lampung.
- CRMP. 1998 (7). An Analysis of Aquaculture in the Coastal Areas of Lampung, Evolution, Status, and Potensial 1998. Technical Report CRMP Lampung. Bandar Lampung.
- CRMP. 1998 (8). Profil Wisata Bahari di Kawasan Pesisir Teluk Lampung. Technical Report CRMP Lampung. Bandar Lampung.
- CRMP. 1998 (9). Kondisi Oseanografi Perairan Pesisir Lampung. Technical Report CRMP Lampung. Bandar Lampung.

- CRMP. 1998 (10). Oseanografi dan Kualitas Perairan Teluk Lampung. Technical Report CRMP Lampung. Bandar Lampung.
- CRMP. 1998 (11). The Utilization Of 'Open Access Resources' In Lampung.
- CRMP. 1998 (12). Pemanfaatan lahan "terbuka" di Lampung. *Technical Report* CRMP Lampung. Bandar Lampung
- Departemen Pekerjaan Umum. Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir. 1998. Pekerjaan Studi Terpadu Pengendalian Banjir Bandar Lampung dan Sekitarnya. Buku 1,2,3 Bandar Lampung.
- Koridor.1999 (8, 15,21 Juli). Artikel : Peluncuran Atlas dan Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung
- Lampung Post. 1999 (Mar 16). Penyelam kejar Sertifikat Dunia
- Lampung Post .1999 (Mar 31). Terumbu karang Perlu Perhatian
- Lampung Post. 1999 (Jul 8). Pesisir dan laut belum berikan kontribusi
- Mahi A.K. 1997. Evaluasi Lahan. Fakultas Pertanian Unila, Jurusan Ilmu Tanah. Bandar Lampung.
- Pemerintah Daerah Tingkat II Bandar Lampung. 1996. Ekspose Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tentang Sistem Pengelolaan Kebersihan Kota Bandar Lampung. Pemda Tingkat II Bandar Lampung.
- USAID. 1996. Contract between the Government of America and Indonesia for technical assistance in Natural Resource Management NRM
- Wiryawan, B. B, Marsden, H. A. Susanto, A.K. Mahi. M. Ahmad, H. Poespitasari (Editor) 1999. Atlas sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung. Kerjasama PEMDA Propinsi Lampung dengan Proyek Pesisir (Coastal Resources Centre, University of Rhode Island dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor), Bandar Lampung, Indonesia 109 p.